

# USAHATANI PADI BERBASIS AGRIBISNIS DI SENTRA PRODUKSI KABUPATEN BANGGAI, SULAWESI TENGAH

IGP. Sarasutha, Lintje Hutahaean, Rahmat H. Anasiru<sup>1</sup>, dan Margaretha S.Lalu<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Jl. Raya Laroso No.62 Biromaru Kotak Pos 51, Palu

<sup>2</sup> Balai Penelitian Serealia, Jl. Dr. Ratulangi, Kotak Pos 173, Maros 90514

## ABSTRACT

Banggai District is one of rice producing centers in Central Sulawesi pointed toward the agribusiness base rice producing center in the Batui Integrated Economic Development Zone (Kapet). Share of agriculture sector in GRDP of Banggai district was 52.03 percent or higher than that in South Sulawesi GRDP (43.37%). However, agricultural resources in Banggai district have not been exploited optimally. Rice agribusiness system is expected to utilize resources integrally from input provision to marketing. The study is aimed at : (1) to get data and information of rice farming agribusiness-oriented rice farming, (2) to understand roles of each sub system in agribusiness system, and (3) to assess effectiveness of rice policy on rice farmers' income in Banggai district. PRA and survey methods were implemented to collect primary data from farmers and traders, while secondary data were collected from related government institutes. Data were analyzed using descriptive method and input-output analysis of farming system. The study showed that (1) rice farming had both comparative and competitive advantages and was possible to become a potential commodity in Batui Kapet, (2) each subsystem of agribusiness system played important role, and (3) rice policy was effective as shown by strong price correlation between those of farm gate and traders or the farmers had strong bargaining position. To support agribusiness-base rice farming, it needs to enhance total agricultural machineries, such as tractors, threshers, and rice milling units (RMUs), managed by private sector through soft credit.

**Key words :** *rice, rice farming, agribusiness*

## ABSTRAK

Kabupaten Banggai adalah salah satu wilayah penghasil padi di Sulawesi Tengah yang diarahkan menjadi pusat produksi padi berbasis agribisnis dalam suatu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batui. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Banggai (52,03 %) lebih besar dibanding provinsi Sulawesi Tengah (43,37 %). Namun, potensi sumberdaya pertanian di Kabupaten Banggai belum dimanfaatkan secara optimal. Sistem agribisnis padi diharapkan dapat mengubah pemanfaatan sumberdaya secara parsial menjadi terpadu mulai dari penyiapan sarana produksi sampai dengan pemasaran hasil. Tujuan pengkajian ini adalah untuk: (1) mendapatkan data dan informasi usahatani padi berbasis agribisnis, (2) mengetahui peran setiap subsistem dalam sistem agribisnis, (3) mengetahui efektivitas kebijakan perberasan terhadap pendapatan petani di Kabupaten Banggai. PRA dan Survei dilakukan selama empat tahun untuk mengumpulkan data primer dari petani dan pedagang responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Analisis data menggunakan cara deskriptif dan analisis input-output usahatani. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa: (1) usahatani padi memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga dapat menjadi komoditas unggulan di KAPET Batui, (2) peran setiap subsistem dalam sistem agribisnis cukup baik, dan (3) kebijakan perberasan cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan petani karena korelasi harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pengecer/konsumen dan posisi tawar petani cukup kuat. Implikasi kebijakan yang diperlukan di masa datang pada lokasi ini untuk mendukung usahatani padi berbasis agribisnis adalah meningkatkan jumlah peralatan dan mesin pertanian untuk usahatani padi seperti traktor, alat perontok (*thresher*), dan penggilingan gabah atau rice milling unit (RMU) yang dikelola oleh swasta yang mendapat pinjaman atau kredit lunak.

**Kata kunci:** *padi, usahatani padi, agribisnis*

*Usahatani Padi Berbasis Agribisnis di Sentra Produksi Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (IGP. Sarasutha, Lintje Hutahaean, Rahmat H. Anasiru, dan Margaretha S. Lalu)*

## PENDAHULUAN

Banggai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya sebagian besar berbasis pertanian. Sumbangan sektor pertanian pada pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Banggai dalam kurun waktu lima tahun (1993-1997) mencapai rata-rata 48,68 persen (Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan, 1999; Akum, 1999) yang meningkat menjadi 52,03 persen pada tahun 2000 (BPS Kabupaten Banggai, 2002). Angka kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Banggai lebih besar dibanding rata-rata kontribusi sektor pertanian pada PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 43,37 persen (BPS Sulteng, 2002). Meskipun kontribusi sektor pertanian mendominasi perolehan pendapatan Kabupaten Banggai, namun potensi sumberdaya yang ada belum dikelola secara optimal, sehingga nilai ekonomi yang diraih sektor ini belum maksimal. Hal ini terjadi karena pembangunan sektor pertanian selama PJP I dilaksanakan dengan pendekatan komoditas, seperti yang dinyatakan Kasryno *et al.* (1993) bahwa pengembangan komoditas secara parsial dan berorientasi pada peningkatan produksi merupakan ciri pelaksanaan pembangunan pada masa itu.

Suatu pendekatan yang diharapkan mampu menangani pengelolaan sektor pertanian untuk memperbesar nilai ekonomi sektor ini adalah melalui pendekatan pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis, dengan memperkuat kekuatan industri dan pertanian seiring dengan pembangunan bidang lainnya serta berporos kepada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Dengan demikian orientasi pendekatan komoditas sudah tidak sesuai lagi diterapkan dalam pembangunan pertanian sehingga harus diubah menjadi pendekatan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian dengan penerapan teknologi maju dalam suatu sistem agribisnis terpadu, dan orientasi pembangunan pertanian berubah dari orientasi peningkatan produksi menjadi peningkatan pendapatan petani,

kesejahteraan, dan nilai gizi masyarakat (Kasryno *et al.*, 1993).

Secara konseptual, agribisnis merupakan usaha yang berkarakter bisnis, pelakunya secara konsisten berupaya untuk meraih nilai tambah (*added value*) komersial dan finansial yang berkelanjutan (*sustainable*). Di sektor pertanian, agribisnis berada dan menjadi bagian dari masyarakat pedesaan. Tidak seperti pertanian tradisional yang berorientasi subsisten, agribisnis merupakan bagian dari sistem ekonomi yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan serta yang menyerap segala sesuatu yang dihasilkannya. Oleh karena itu, Adjid (1995) mengatakan bahwa agribisnis mengambil posisi sebagai pemain aktif dari pasar yang berarti harus mampu menawarkan produk yang bersaing dalam kualitas, harga, dan pelayanan.

Sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktifitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani dan agroindustri, yang saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yaitu: (1) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi, dan pengembangan sumberdaya pertanian, (2) subsistem budidaya atau usahatani, (3) subsistem pengelolaan hasil pertanian atau agroindustri, (4) subsistem pemasaran hasil pertanian, (5) subsistem prasarana, dan (6) subsistem pembinaan. Berkaitan dengan itu, maka pengembangan usahatani padi yang merupakan komoditas andalan di kabupaten Banggai diupayakan mengikuti pola agribisnis.

Kawasan Batui-Toili di Kabupaten Banggai merupakan sentra produksi padi yang diarahkan untuk mengikuti sistem pertanian dengan pola agribisnis yang bertujuan untuk menjadikan kawasan ini sebagai akselerator pusat pertumbuhan daerah setempat yang berintikan pada usahatani komersial dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan dinamika pasar sebagai penggerak utama. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi petani dalam usahatani padi antara lain: (1) kurangnya

tenaga pengolah tanah (traktor) yang menyebabkan tidak serempaknya waktu tanam yang memungkinkan terjadinya serangan hama penyakit, (2) kurangnya peralatan perontok gabah (*thresher*) yang dapat mengakibatkan tersimpannya gabah yang belum dirontokkan di sawah sampai beberapa hari, menyebabkan rusaknya gabah (mutu beras rendah), (3) kurangnya RMU yang memiliki sistem dua kali proses (*double phase*), yang dapat menyebabkan mutu gabah rendah, dan (4) rendahnya harga gabah/beras di bawah harga dasar.

Kegiatan pengkajian usahatani padi berbasis agribisnis di kawasan Batui-Toili ini hendak mengungkap potensi sumberdaya yang ada dan sampai sejauh mana peranan setiap subsistem dalam sistem agribisnis selama empat tahun. Di samping itu, akan diungkap efektivitas kebijakan pemerintah terutama pemberlakuan Harga Dasar Gabah (HDG) dan Usaha Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).

Tujuan pengkajian ini adalah untuk: (1) mendapatkan data dan informasi usahatani padi berbasis agribisnis, (2) mengetahui peran setiap subsistem dalam sistem agribisnis, (3) mengetahui efektivitas kebijakan perberasan terhadap pendapatan petani di Kabupaten Banggai.

## METODE PENELITIAN

### Penentuan Lokasi

Pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan Batui dan Toili, kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dua kecamatan ini termasuk dalam empat kecamatan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapot) di samping Kecamatan Luwuk dan Kintom (Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan, 1999; Ponulele, 1999). Keempat kecamatan ini termasuk ke dalam wilayah pengembangan I (BPS Kabupaten Banggai, 1999) meskipun wilayah pengembangan ini hanya berdasarkan pada batas-batas administratif tanpa mempertimbangkan potensi dan kemampuan serta kesesuaian lahan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Syafuddin *et*

*al.*, 1999). Oleh karena itu, dalam kegiatan penelitian ini dibahas juga hal-hal yang berkaitan dengan potensi Kecamatan Luwuk dan Kintom, sepanjang erat kaitannya dengan sistem agribisnis yang ada di dua kecamatan terpilih yaitu Batui dan Toili.

### Cakupan Kegiatan

Penelitian ini merupakan kegiatan berkelanjutan yang dimulai pada Desember 1999 sampai dengan Desember 2002, yang terbagi atas tahapan-tahapan kegiatan yaitu pada tahun 1999 untuk sistem agribisnis, tahun 2000 dan 2001 untuk pengkajian UPJA, dan pada tahun 2002 untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pendapatan petani (Sarasutha *et al.*, 2000; Anasiru *et al.*, 2001; Hutahaeen *et al.*, 2002; Sarasutha *et al.*, 2003).

Ruang lingkup kegiatan penelitian ini meliputi pelaksanaan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait antara lain Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP), Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pertani, Depot Logistik (Dolog), PT Pupuk Sriwijaya (PT PUSRI), yang berada di Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan pengumpulan data primer dilakukan melalui metode survai dengan melakukan wawancara kepada petani, pedagang, pemuka masyarakat, ketua kelompok petani, yang dirangkaikan dengan identifikasi dan analisis peranan dari setiap subsistem dalam sistem agribisnis.

### Tahapan Kegiatan

Sebelum melakukan penelitian, dilakukan tahapan kegiatan antara lain:

1. Tahap persiapan sebelum ke lapangan yaitu pembuatan daftar pertanyaan (*questionnaires*) tidak berstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dikembangkan di lapangan. Pertanyaan kunci ini meliputi sistem penguasaan lahan, masalah/kendala yang dihadapi dalam berusaha, pengeluaran dan pendapatan usahatani. Pertanyaan

kunci ini diperlukan dalam melakukan wawancara kepada petani, informan kunci (pemuka masyarakat, ketua kelompok tani) dan para pelaku di setiap subsistem dalam sistem agribisnis padi. Pertanyaan kunci diperlukan untuk menuntun peneliti dalam wawancara semi struktural (WSS) yang akan dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pelaksanaan studi pustaka (*desk study*) dilakukan dengan membaca, mengulas, dan menyimpulkan hasil dari pustaka untuk mempermudah pembuatan pertanyaan kunci dan memperluas wawasan berpikir dan bertindak bagi para peneliti sebelum masuk ke lapangan.

2. Tahapan pelaksanaan kegiatan di lapangan (pengumpulan data primer) dalam kegiatan pemahaman pedesaan partisipatif (*Participatory Rural Appraisal = PRA*) dilakukan melalui wawancara kepada pelaku (responden) pada setiap subsistem dalam sistem agribisnis padi. Wawancara kepada responden menggunakan daftar pertanyaan tidak berstruktur dilakukan baik secara kelompok maupun perorangan (individu) dan observasi langsung ke lapangan.
3. Tahapan pelaksanaan kegiatan survei menggunakan daftar pertanyaan berstruktur yang disusun secara sistematis, mulai dari sistem penguasaan lahan, input-output usahatani, sampai dengan pemasaran hasil. Responden dari kegiatan survei ini adalah petani padi.

### **Metode Pengumpulan Data/Informasi**

Responden ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) untuk kegiatan yang menggunakan metode PRA. Pemilihan desa dan jumlah responden dilakukan sebagai berikut: (1) tiap kecamatan dipilih dua desa (desa dengan produktivitas padi tinggi dan rendah) sehingga terdapat empat desa, (2) jumlah responden tiap desa adalah: petani lima orang, pemuka masyarakat satu orang, ketua kelompok tani satu orang, pedagang pengumpul dua orang, pedagang pengecer dua orang. Total responden yang diwa-

wancara adalah 44 orang. Wawancara kepada responden menggunakan daftar pertanyaan tidak berstruktur yang dilakukan untuk para pelaku pada subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, subsistem budidaya (usahatani), subsistem pengelolaan hasil pertanian, sampai dengan pemasaran hasil dan prasarana pendukung dalam sistem usahatani padi berbasis agribisnis.

PRA dilakukan untuk mendapatkan data primer menggunakan metode wawancara dua arah yang melibatkan responden dalam suatu diskusi mengenai potensi, masalah, dan kendala dalam berusahatani sampai dengan pemasaran hasil. Metode ini pada awalnya diformulasikan sebagai penilaian secara cepat menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif oleh para sosiolog pedesaan yang disebut "*Rapid Rural Appraisal*" (Chambers, 1981; Chambers, 1991; Beebe, 1987; Grandstaff dan Grandstaff, 1987; Smith, 1993). Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data/informasi secara menyeluruh (holistik). Selesai wawancara, dilakukan klarifikasi data antar peneliti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menafsir data.

Metode survei dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara kepada petani responden menggunakan daftar pertanyaan berstruktur. Daftar pertanyaan disusun mulai dari informasi pemilikan/penguasaan lahan, cara berusahatani, data masukan/input (berupa fisik dan pengeluaran usahatani) serta data keluaran/output (berupa hasil dan pendapatan usahatani padi). Petani responden dipilih secara acak distratifikasi berimbang (*Proportionate Stratified Random Sampling*). Stratifikasi berdasarkan atas petani (20 orang) pedagang pengumpul di desa (8 orang), pedagang pengecer di kecamatan (8 orang), dan pedagang besar di dalam/luar kecamatan (4 orang). Jumlah responden dari kegiatan survei ini adalah 40 orang

### **Metode Analisis**

Setelah diklarifikasi melalui diskusi tim peneliti untuk mengetahui sejauh mana akurasi data yang diperoleh, maka tahapan berikut adalah

menghimpun data, mengedit, dan tabulasi data secara sistematis. Setelah itu dilakukan analisis data baik secara deskriptif, tabulasi silang, analisis finansial, keunggulan komparatif dan kompetitif, skala minimum usahatani, dan persamaan matematis.

Formula untuk menghitung pendapatan usahatani (atas dasar biaya tidak tetap secara tunai) yang dikeluarkan petani (Soekartawi *et al.*, 1984) adalah sebagai berikut:

$$PU = NP - BP \text{ dan } NP = P \times H$$

Dimana: PU = Pendapatan usahatani (Rp/ha); NP = Nilai produksi (Rp/ha); P = Produksi/hasil (t/ha); H = Harga hasil (Rp/kg); BP = Biaya produksi (biaya sarana produksi + biaya tenaga kerja + biaya panen dan processing); R/C rasio = NP/BP

Perhitungan usahatani yang dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pendapatan usahatani faktual. Namun untuk mengetahui seberapa besar skala minimum usahatani yang seharusnya dipersiapkan agar mencapai keuntungan yang optimal, perlu dilakukan perhitungan secara perusahaan yaitu menghitung pengeluaran tunai dan pengeluaran yang diperhitungkan (bunga modal dan sewa tanah).

Formula untuk menentukan keunggulan komparatif (analisis keunggulan komparatif = analisis keuntungan kompetitif produksi) adalah sebagai berikut (Manwan *et al.*, 1990; Adnyana dan Kariyasa, 1995)

$$p_i = (e_i + d_0) : b_0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana: p = produksi minimal (kg/ha) komoditas yang diunggulkan; I = komoditas lainnya (1, 2, ..., n); e<sub>i</sub> = keuntungan (Rp/ha) komoditas i = 1, 2, ..., n.; d<sub>0</sub> = biaya produksi (Rp/ha) komoditas yang diunggulkan; b<sub>0</sub> = harga (Rp/kg) komoditas yang diunggulkan.

Formula untuk menentukan keunggulan kompetitif (analisis keunggulan kompetitif = analisis keuntungan kompetitif harga) adalah sebagai berikut (Adnyana dan Kariyasa, 1995)

$$h_i = (e_i + d_0) : t_0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana: h = harga minimal (Rp/kg) komoditas yang diunggulkan pada tingkat produksi tetap; i = komoditas lainnya (1, 2, ..., n); e<sub>i</sub> = keuntungan (Rp/ha) komoditas i = 1, 2, ..., n.; d<sub>0</sub> = biaya produksi (Rp/ha) komoditas yang diunggulkan; t<sub>0</sub> = produksi (kg/ha) komoditas yang diunggulkan

Formula yang digunakan untuk menganalisis skala minimum usahatani (SMU) adalah sebagai berikut (Sigit, 1979):

$$BEP = BT : (1 - BV/NP)$$

$$SMU = BEP : NP$$

Dimana: BEP = titik impas (*break even point*); BT = biaya tetap (*fixed cost*); BV = biaya tidak tetap/biaya berubah (*variable cost*); NP = Nilai produksi; SMU = Skala minimum usahatani

Untuk mengetahui posisi tawar (*bargaining position*) petani, dilakukan analisis integrasi pasar melalui persamaan korelasi dengan formula yang dikemukakan oleh Gudjarati (1993) sebagai berikut:

$$b_i = \frac{n \sum Pr_i Pf_i - (\sum Pr_i)(\sum Pf_i)}{\sqrt{\{n \sum Pr_i^2 - (\sum Pr_i)^2\} \{n \sum Pf_i^2 - (\sum Pf_i)^2\}}}$$

Dimana: b<sub>i</sub> = koefisien korelasi; Pr = harga beras di tingkat pengecer/konsumen (Rp); Pf = harga beras di tingkat petani (Rp); n = jumlah sampel

Jika b<sub>i</sub> = 1; terjadi integrasi harga secara sempurna antara pasar tingkat petani dan pengecer/konsumen yang berarti pasarnya bersaing sempurna, sehingga dapat dikatakan bahwa pemasaran adalah efisien

b<sub>i</sub> ≠ 1; tidak terjadi integrasi harga secara sempurna antara pasar tingkat petani dan pengecer/konsumen yang berarti pasarnya tidak bersaing sempurna sehingga dapat dikatakan bahwa pemasaran tidak efisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadaan Umum Daerah Penelitian

Kapet Batui yang terdiri atas Kecamatan Toili, Batui, Kintom, Luwuk, termasuk ke dalam wilayah pembangunan I (BPS Kab. Banggai, 1999). Kecamatan Toili memiliki wilayah yang terluas (1.976,62 km<sup>2</sup> atau 15,34% dari total wilayah Kabupaten Banggai) dengan jumlah desa sebanyak 34 buah, jumlah KK 15.655 dari jumlah penduduk sebanyak 61.629 jiwa. Kepadatan penduduk per desa dan per km<sup>2</sup> terbesar pada Kecamatan Luwuk (Tabel 1). Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Luwuk termasuk perkotaan di Kabupaten Banggai. Rata-rata sex rasio di Kabupaten Banggai adalah 104 orang yang berarti perbandingan antara laki-laki dan wanita adalah 104 berbanding 100.

Rasio beban tanggungan (RBT) Kabupaten Banggai relatif tidak berubah dari tahun 1999 (52,22%) menjadi 52,97 persen pada tahun 2001. Ini berarti bahwa penduduk usia tidak produktif sebanyak 52,22-52,97 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Banggai adalah 83,34 persen yang berarti perbandingan penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja dengan penduduk usia 10 tahun ke atas nilainya adalah 83,34 persen. RBT dan TPAK memiliki hubungan yang erat dan secara teoritis seharusnya makin kecil nilai RBT dan makin besar nilai TPAK makin baik. Nilai RBT melebihi 50 persen karena penduduk usia 10-14 tahun termasuk dalam perhitungan penduduk usia

tidak produktif, sedangkan pada kenyataannya di lapangan penduduk usia antara 10-14 tahun sudah aktif membantu orang tuanya di usahatani. Oleh karena itu, dalam kenyataannya penduduk usia bekerja (yang sudah dan masih produktif) lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Syafruddin *et al.* (1999). Tingginya nilai TPAK ini memberikan arti bahwa peluang pengembangan usahatani padi berbasis agribisnis tidak akan mengalami masalah ditinjau dari aspek tenaga kerja (ketersediaan angkatan kerja). Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (RJK) sebesar 104 persen dan yang tertinggi adalah di Kecamatan Toili yaitu 107 persen. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (1994-1998) di Kabupaten Banggai adalah 1,42 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan SP 1980 dan SP 1990 adalah 2,62 persen. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu lima tahun setelah SP 1990 terjadi penurunan rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banggai.

Di wilayah Kecamatan Toili, terdapat sembilan daerah irigasi dan yang terluas memiliki potensi mengairi lahan sawah adalah daerah irigasi Mentawa (3.337,00 ha) diikuti oleh daerah irigasi Singkoyo (3.037,00 ha). Namun secara fungsional, lahan sawah yang dapat diairi terbanyak adalah di daerah irigasi Singkoyo (1.916,00 ha) dan diikuti oleh daerah irigasi Mentawa (1.612 ha). Jika dibandingkan antara

Tabel 1. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kapet Batui Dibanding Kabupaten Banggai, 1999

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> ) <sup>a)</sup>	Jumlah desa	Jumlah KK	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk			Sex rasio
					Per desa	Per km <sup>2</sup>	Per RT	
Toili	1.976,62 (15,34)	34	15.655	61.629	1.813	31	4	107
Batui	1.390,33 (10,79)	14	5.295	21.976	1.570	16	4	104
Kintom	518,72 (4,02)	12	3.157	11.218	935	22	4	98
Luwuk	734,70 (5,70)	20	16.037	65.799	3.290	90	4	100
Kabupaten Banggai	12.887,16 (100)	217	68.635	275.223	1.268	21	4	104

Sumber: BPS Kab. Banggai (2002)

a) Angka dalam kurung menyatakan persentase (%)

Tabel 2. Jumlah Daerah Irigasi dan Luas Areal Sawah (ha) di Kapet Batui, Kabupaten Banggai, 1999-2002

Kecamatan	Daerah irigasi	Luas areal sawah (ha)	
		Potensial	Fungsional <sup>a)</sup>
Toili	1. Singkoyo	3.037,00	1.916,00 ( 63,09)
	2. Tolisu	1.332,60	437,65 ( 32,84)
	3. Tolisu/Sindang	823,30	467,65 ( 56,80)
	4. Moilong	630,00	520,00 ( 82,54)
	5. Toili	1.646,00	1.300,00 ( 78,98)
	6. Dongin	1.435,00	1.220,00 ( 85,02)
	7. Topo	392,00	316,00 ( 80,61)
	8. Mentawa	3.337,00	1.612,00 ( 48,31)
	9. Rata	703,00	512,00 ( 72,83)
Batui	1. Bakung	1.200,00	818,00 ( 68,17)
Luwuk	1. Pohi	135,00	65,0 ( 48,15)
	2. Baya	306,00	306,00 (100,00)
	3. Bantayan	375,00	220,70 ( 58,85)

Sumber: BPS Kab. Banggai (1999 dan 2002)

<sup>a)</sup> Angka dalam kurung menyatakan persentase (%) fungsional terhadap potensial tiap daerah irigasi.

potensi dapat mengairi dengan aktualitas sawah yang terairi di tiap daerah irigasi, maka persentase yang terbesar terdapat pada daerah irigasi Dongin (85,02%) seperti disajikan pada Tabel 2.

## Usahatani Padi Berbasis Agribisnis

### *Subsistem Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi*

Peralatan usahatani padi yang sangat dibutuhkan adalah alat/mesin pengolah tanah (traktor). Kurangnya traktor untuk mengolah tanah menyebabkan sering terjadi keterlambatan menanam. Di Kecamatan Batui, jumlah traktor hanya 14 unit (Sarasutha *et al.*, 2000). Kapasitas traktor untuk mengolah tanah adalah 15 ha per musim tanam sehingga dari luas panen 2.565 ha (Tabel 5) dibutuhkan traktor sebanyak 171 unit. Kurangnya alat pengolah tanah mengakibatkan pada musim tanam (MT) Mei-Juni terjadi keterlambatan tanam. Waktu tanam mundur menjadi bulan Juli. Peralatan lain yang masih dibutuhkan petani sampai saat ini adalah penggilingan padi (*Rice Milling Unit Double Phase*). Di Kecamatan Batui terdapat tujuh penggilingan padi dan hanya

satu RMU Double Phase yaitu penggilingan padi yang memiliki alat pembersih/penghalus/pengkilap (*polisher*). Beras yang dihasilkan dari penggilingan yang tidak menggunakan polisher terlihat kuning atau agak gelap/kualitas beras kurang baik (Sarasutha *et al.*, 2000).

Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) telah dilakukan pemerintah melalui bantuan *Second Kennedy Round* (UPJA-SKR) sejak tahun 1995-2000. Model ini berlanjut dengan dikembangkannya UPJA bantuan SPL-OECF yang dimulai pada April 2000. Meskipun demikian, jumlah traktor di kecamatan Toili 210 unit yang lebih sedikit dibanding jumlah optimal untuk pengolahan tanah yaitu 639 unit. Jumlah traktor di kabupaten Banggai 798 unit (termasuk 64 unit SPL-OECF) sedangkan lahan yang akan diolah lebih luas dibanding kapasitas traktor, menyebabkan terjadinya keterlambatan tanam. Jumlah traktor yang optimal adalah 1.558 unit (Anasiru *et al.*, 2001). Oleh karena itu, petani menggunakan ternak sapi sebagai tenaga pengolah tanah, terutama petani yang memiliki ternak sapi (Hutahaeen *et al.*, 2002).

Sebagian besar petani menggunakan alat perontok pedal (*pedal thresher*) sehingga kebi-

jakan mengembangkan mesin perontok (*power thresher*) kurang berhasil, yang ditunjukkan dengan terbatasnya jumlah *power thresher* di kecamatan Toili. Di Kabupaten Banggai, jumlah mesin perontok 151 unit (termasuk 64 unit UPJA SPL-OECF), sedangkan jumlah optimal adalah 1.363 unit (Anasiru *et al.*, 2001). Hutahaean *et al.* (2002) menyatakan bahwa petani sebagian besar menggunakan cara banting dan *pedal thresher* karena *power thresher* secara teknis sulit dipindah-pindah (berat) dan di daerah ini banyak buruh perontok. Namun, cara banting dan penggunaan *pedal thresher* menyebabkan tersimpannya gabah di sawah selama 2-4 hari setelah dipotong (sebelum dirontokkan) sehingga menghasilkan beras berwarna kuning.

Benih padi yang digunakan oleh petani umumnya berasal dari hasil pertanamannya sendiri setelah digunakan beberapa kali musim tanam. Meskipun dilakukan seleksi oleh petani mulai dari memilih pertanaman yang pertumbuhannya baik sampai dengan panen dengan memilih gabah berisi (bernas), namun benih tersebut tidak termasuk benih bermutu yang berlabel. Hasil yang diharapkan dari usahatani tersebut belum optimal. Benih berlabel yang beredar di petani dirasakan masih kurang. Pada program KUT disediakan benih bermutu, namun kadang terjadi benih terlambat datang atau kurang tersedia sesuai varietas yang diinginkan petani. Petani mengambil uang benih dan mencari sendiri di tetangga.

Pada MT 1999/2000 di Kabupaten Banggai, target penggunaan pupuk untuk pertanaman padi, jagung, dan kedelai adalah: 1.843 ton urea; 390 ton SP36; 159 ton ZA; dan 303 ton KCl. Realisasi penggunaan pupuk pada saat itu untuk ketiga komoditas tersebut berturut-turut adalah: 1.395 ton urea (75,69%), 914 ton TSP/SP36 (234,95%), 569 ton ZA (357,68%), 630 ton KCl (207,02%). Ternyata bahwa realisasi penggunaan pupuk SP36, ZA, KCl jauh melebihi target, kecuali realisasi penggunaan pupuk urea yang lebih kecil dari target (75,69%) seperti disajikan pada Tabel 3. Hal ini menandakan bahwa pupuk di Pusri umumnya tersedia seperti

yang dijelaskan oleh Kepala PT. Pusri Kabupaten Banggai.

Tabel 3. Luas Tanam Padi dan Penggunaan Pupuk di Kabupaten Banggai, 1999

Uraian	Kabupaten Banggai <sup>a)</sup>	Kapet Batui
<b>Luas tanam (ha)</b>		
Target	22.810	17.731
Realisasi	22.051	17.731 <sup>b)</sup>
Persentase realisasi	97	100
<b>Penggunaan pupuk (t) <sup>*</sup></b>		
Urea		
- Target	1.843	1.433
- Realisasi	1.395	1.122
- Persentase realisasi	76	78
TSP/SP36		
- Target	390	303
- Realisasi	914	735
- Persentase realisasi	234	243
ZA		
- Target	159	124
- Realisasi	569	458
- Persentase realisasi	358	369
KCl		
- Target	303	236
- Realisasi	630	507
- Persentase realisasi	208	215

Sumber: <sup>a)</sup> Sek. Pel. Bimas Kab. Banggai (1999)

<sup>b)</sup> BPS Kab. Banggai (2000)

Keterangan: <sup>\*</sup> Penggunaan pupuk (t) untuk Kapet Batui merupakan perkiraan berdasarkan persentase luas panen antara Kapet Batui dengan Kab. Banggai. Misalnya untuk urea, target:  $17.731 : 22.810 \times 1.843 = 1.433$  ton

Data target dan realisasi penggunaan pupuk tidak dirinci berdasarkan atas komoditas yang diusahakan petani, namun penggunaan untuk padi terbanyak, sehingga analisis deskriptif dilakukan hanya pada komoditas padi (Tabel 3).

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2002 (Sarasutha *et al.*, 2003), 25 persen petani menggunakan pupuk urea saja, 15 persen menggunakan urea+SP36, 15 persen urea+ZA, 20 persen urea+SP36+KCl, 15 persen urea+SP36+ZA, 5 persen urea+SP36+KCl+ZA, dan 5 persen tidak memupuk. Petani yang tidak memupuk memiliki berbagai alasan antara lain:

Tabel 4. Rata-rata Penyaluran/Penjualan Pupuk per Tahun pada Periode Enam Tahun (1993-1998) di Kabupaten Banggai, 1999

Tahun	Penyaluran/penjualan pupuk (t) <sup>a)</sup>			
	Urea	TSP/SP36	ZA	KCl
1993	1.593	304	289	248
1994	1.746	622	490	230
1995	2.004	433	359	278
1996	1.891	562	614	376
1997	1.354	274	366	278
1998	2.827	796	607	72
Rata-rata	1.902	498	454	247
Laju pertumbuhan (%/tahun)	20	49	28	-10

Sumber: PT. PUSRI Palu (1999)

Keterangan: <sup>a)</sup> Total penyaluran/penjualan pupuk selama 12 bulan yang dilakukan oleh PT. PUSRI Luwuk, kabupaten Banggai, untuk tanaman pangan yang tidak dirinci menurut komoditas.

(1) tidak mengikuti kredit program pemerintah, (2) tidak ada modal, (3) pupuk tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Berbagai jenis pestisida tersedia di kios saprodi atau toko-toko saprodi yang ada di kota Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai), sehingga petani tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan pestisida. Prasarana dan sarana dari lokasi usahatani ke kota sangat mudah dan bukan merupakan masalah bagi petani.

Rata-rata penyaluran/penjualan pupuk per tahun pada periode enam tahun (1993-1998) untuk urea adalah 1.902 ton, SP36 498 ton, ZA 454 ton, dan KCl sebanyak 247 ton. Penyaluran/penjualan pupuk urea, SP36, dan ZA cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan berturut-turut adalah 20 persen/tahun, 49 persen/tahun, dan 28 persen/tahun. Penyaluran/penjualan pupuk KCl cenderung menurun dengan laju penurunan sebesar 10 persen/tahun (Tabel 4).

#### **Subsistem Produksi/Budidaya (Usahatani)**

Produktivitas padi sawah yang tertinggi dicapai petani di Kecamatan Toili yaitu 4,02 ton/ha dengan rata-rata produktivitas di Kapet Batui sebesar 3,86 t/ha yang lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas di Kabupaten Banggai (3,70 ton/ha). Produktivitas padi ladang tertinggi dicapai petani di Kecamatan Kintom (1,86 ton/ha), lebih tinggi dibanding rata-rata

produktivitas di Kapet Batui (1,77 ton/ha) dan Kabupaten Banggai (1,83 ton/ha) seperti disajikan pada Tabel 5.

Hasil wawancara dengan petani responden di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa usahatani padi masih memberikan keuntungan, dengan nilai R/C rasio berturut-turut 1,88 (1999), 1,52 (2001), dan 1,61 (2002) seperti disajikan pada Tabel 6. R/C rasio 1,88 berarti setiap penambahan biaya Rp 1, akan memberikan penerimaan (nilai produksi) sebesar Rp 1,88. Terjadi penurunan nilai R/C rasio pada tahun 2001 menjadi 1,52 dan pada tahun 2002 menjadi 1,61. Hal ini disebabkan karena: (1) produktivitas padi pada tahun 2001 dan 2002 lebih rendah dibanding periode 1999, menyebabkan penerimaan (*Revenue = R*) lebih rendah dan (2) jumlah biaya usahatani pada tahun 2001 dan 2002 meningkat, menyebabkan unsur biaya (*C*) lebih tinggi. Agar nilai R/C minimal 2,00 diperoleh, perlu dilakukan perbaikan teknologi budidaya padi yang merupakan komponen teknologi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu atau PTT (Zaini *et al.*, 2003) antara lain: (1) menggunakan benih berkualitas dari varietas unggul, (2) pengurangan jumlah tanaman/rumpun yang digunakan petani dari rata-rata 10 menjadi 1-3 tanaman/rumpun sehingga dapat mengurangi jumlah benih yang dibutuhkan dan biaya pembelian benih, (3) pemberian pupuk N berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD), sehingga

Tabel 5. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Kabupaten Banggai, 1999

Komoditas padi	Kecamatan				Kapet Batui	Kabupaten Banggai
	Toili	Batui	Kintom	Luwuk		
<b>Padi sawah</b>						
- Luas panen (ha)	14.461	2.565	0	705	17.731	26.752
- Produksi (ton)	58.102	7.877	0	2.479	68.458	99.018
- Produktivitas (ton/ha)	4,02	3,07	0	3,52	3,86	3,70
<b>Padi ladang</b>						
- Luas panen (ha)	250	226	141	1.529	2.146	3.209
- Produksi (ton)	416	389	262	2.723	3.790	5.872
- Produktivitas (ton/ha)	1,66	1,72	1,86	1,78	1,77	1,83
<b>Padi (sawah + ladang)</b>						
- Luas panen (ha)	14.711	2,791	141	2.234	19.877	29.961
- Produksi (ton)	58.518	8,266	282	5.202	72.248	104.890
- Produktivitas (ton/ha)	3,98	2,96	1,86	2,33	3,63	3,50

Sumber: BPS Kabupaten Banggai (1999)

dapat menggunakan pupuk secara efisien sesuai yang dibutuhkan tanaman, dan (4) cara panen dan perontokan gabah dengan menggunakan mesin perontok (*thresher*), sehingga dapat memperkecil kehilangan hasil.

Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi padi di 22 provinsi dengan menggunakan 11 komponen teknologi PTT untuk meningkatkan produktivitas (Zaini *et al.*, 2003). Fagi *et al.* (2002) dan Gani *et al.* (2002) melaporkan bahwa dengan penggunaan teknologi PTT dapat dicapai R/C rasio sampai 2,9. Budianto (2003) melaporkan bahwa penggunaan teknologi PTT di 28 lokasi dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani antara Rp 395.000 – Rp 1.485.000.

Hasil pengkajian Hutahaean *et al.* (2001) menyatakan bahwa proses produksi usahatani padi menggunakan traktor dalam pengolahan tanah lebih efisien (48 – 68 jam lebih cepat) dibanding menggunakan ternak sapi. Kelayakan usahatani padi dinilai dari aspek agribisnis oleh Hutahaean *et al.* (2001) meliputi kelayakan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dari enam model pemanfaatan alsintan dalam agribisnis beras di kabupaten Banggai dapat disimpulkan bahwa usahatani dengan mengolah

tanah menggunakan traktor lalu merontokkan gabah dengan cara banting dan menggunakan penggilingan beras *single phase* memiliki efisiensi tertinggi dengan nilai R/C 2,16. Namun jika ditinjau dari nilai nominal pendapatan usahatani maka usahatani dengan menggunakan traktor untuk pengolahan tanah kemudian merontok dengan *power thresher* dan menggiling menggunakan penggilingan *double phase* adalah tertinggi yaitu Rp 2.561.611/ha dengan nilai R/C ratio 1,93.

Pengolahan tanah menggunakan traktor memiliki nilai tambah usahatani yang lebih tinggi karena: (1) dapat mempersingkat waktu pengolahan tanah dengan nilai sewa yang lebih murah dibanding menggunakan ternak, (2) hasil olah tanah menggunakan traktor lebih baik dibanding menggunakan ternak. Menurut Palloge (1998) dalam Swastika *et al.* (2002), jam kerja yang dibutuhkan untuk pengolahan tanah tiap ha adalah 193 jam (tenaga manusia), 54 jam (tenaga sepasang ternak), dan traktor tangan 17 jam. Oleh karena itu, produktivitas kerja traktor tangan adalah 11 kali dibanding tenaga kerja manusia. Hasil penelitian di Kalimantan Timur (Swastika *et al.*, 2002) menginformasikan bahwa peningkatan jumlah traktor di tingkat petani secara nyata berdampak positif terhadap pening-

Tabel 6. Analisis Usahatani Padi di Kabupaten Banggai (1999, 2001, dan 2002)

Uraian	1999	2001	2002
Biaya produksi (Rp/ha)	1.371.825	1.363.000	1.521.037
a. Sarana produksi	554.325	488.000	609.475
- benih	90.000	150.000	152.300
- pupuk	404.708	203.000	290.325
- pestisida	59.617	135.000	166.850
b. Tenaga kerja	817.500	875.000	911.562
Biaya panen dan pasca panen (Rp/ha) <sup>a)</sup>	1.197.790	921.500	1.274.716
Jumlah biaya usahatani padi (Rp/ha)	2.569.615	2.284.500	2.795.753
Nilai produksi (Rp/ha)	4.843.416	3.465.495	4.514.402
Pendapatan usahatani (Rp/ha)	2.273.801	1.180.995	1.718.649
R/C rasio	1,88	1,52	1,61
BEP (Rp/ha)	2.169.809	2.205.882	2.236.842
SMU (ha) <sup>b)</sup>	0,45	0,64	0,50

Sumber data: data primer (hasil wawancara kepada petani responden)

Keterangan : a) termasuk biaya panen, perontokan, dan penggilingan.

b) dihitung biaya tetap (sewa lahan, bunga modal) sebagai komponen analisis

katan luas lahan sawah yang ditanami dua kali per tahun, di samping akan meningkatkan intensitas pertanaman (IP) dari satu kali menjadi dua kali per tahun. Penggunaan traktor dapat mempercepat pengolahan tanah sehingga dapat menghindari keterlambatan tanam. Peningkatan jumlah traktor sebesar 10 persen akan diikuti oleh peningkatan luas lahan yang ditanami dua kali setahun sebesar 3,4 persen.

Penggunaan *power thresher* memiliki nilai tambah usahatani yang lebih tinggi karena: (1) dapat mengurangi kehilangan hasil dalam proses pasca panen dan (2) efisiensi tenaga kerja terutama pada daerah dimana tenaga kerja panen dan pasca panen sulit diperoleh. Hasil penelitian Setyono dan Nugraha (2001) menyatakan bahwa kehilangan hasil selama penanganan pasca panen relatif tinggi mencapai 20,8 persen, tertinggi terjadi pada proses pemanenan (9,5%) dan perontokan (4,8%). Hasil uji coba kelompok jasa pemanen (30 orang/ha) dengan menggunakan mesin perontok menunjukkan bahwa kehilangan hasil selama panen sampai perontokan berkisar

antara 4,3-4,9 persen, sedangkan pemanenan padi secara keroyokan menyebabkan kehilangan hasil antara 15,2-16,8 persen.

Prabowo *et al.* (2002) menyatakan bahwa penggunaan *power thresher* meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, mengatasi penundaan perontokan dan mempercepat jadwal tanam berikutnya. Efisiensi terlihat pada serapan tenaga kerja yaitu 41,13 HOK/ha untuk tenaga gebot sedangkan menggunakan *power thresher* hanya membutuhkan waktu 2-4 HOK/ha.

### **Subsistem Pengelolaan Hasil**

Pada umumnya gabah yang dihasilkan petani dikeringkan di rumah/halaman rumah petani dan sebagian kecil dikeringkan di KUD atau penggilingan swasta lainnya dengan biaya penggilingan sebesar 10 persen dari jumlah beras yang dihasilkan. Selain hasil berupa beras, jarang sekali petani menjual dalam bentuk tepung beras, kecuali untuk kebutuhan sendiri atau dijual di pasar. Karena beras merupakan komoditas stra-

Tabel 7. Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Banggai, 1998-2001

Kecamatan	Aspal	Kerikil	Tanah	Jumlah
Toili	179,60	44,70	10,90	235,20
Batui	69,10	60,20	15,00	144,30
Bunta	121,4	184,00	87,00	392,40
Kintom	3,00	48,90	10,00	61,90
Luwuk	227,50	112,8	3,00	343,30
Pagimana	113,4	121,90	207,10	442,40
Lamala	81,10	132,90	20,00	234,00
Balantak	68,40	14,20	25,00	107,60
Banggai 2001	863,50	719,60	378,00	1.961,10
2000	449,20	643,60	273,7	1.366,50
1999	554,10	588,90	284,3	1.427,30
1998	555,555	843,62	455,62	1.854,79
Rata-rata Laju Pertumbuhan (%/th)	24,35	-3,04	-1,07	5,40

Sumber: BPS Kabupaten Banggai (2002).

tegis dan sebagai makanan pokok masyarakat (*staple food*) maka perubahan bentuk produk tidak menjadi kebutuhan utama untuk pemasarannya.

### **Subsistem Pemasaran Hasil**

Sebagian besar pemasaran hasil dilakukan dalam bentuk beras dan sangat sedikit petani melakukan pemasaran hasil dalam bentuk gabah. Pemasaran dilakukan petani dengan berbagai cara yaitu: (1) petani menjual gabah/beras ke pedagang pengumpul yang ada di desa atau dari desa/kecamatan lain, (2) petani menjual ke LSM jika petani mengambil kredit usahatani (KUT) di LSM yang bersangkutan, (3) petani menjual ke penggilingan (milik perorangan/swasta) ditempat petani menjemur dan menggiling gabahnya, (4) petani menjual ke KUD, dimana petani menjemur dan menggiling gabahnya terutama bagi petani yang menjadi anggota KUD, (5) petani menjual beras langsung ke pasar desa, kecamatan, atau ke pasar kabupaten. Pada umumnya petani tidak menemukan kesulitan dalam memasarkan gabah atau beras yang dihasilkan usahatannya. Masalah yang dihadapi petani adalah

harga yang sering di bawah harga dasar (*floor price*).

### **Subsistem Penunjang (Prasarana dan Pembinaan)**

Lokasi kecamatan Batui dan Toili sebagai penghasil utama padi di Kabupaten Banggai sangat dekat dengan ibukota kabupaten sehingga informasi harga-harga masukan (input) produksi maupun harga hasil (output) cepat diketahui petani. Pembinaan dalam rangka alih teknologi telah dilakukan oleh institusi pertanian dalam hal ini BPP, BIPP, dengan aparat penyuluh pertaniannya meskipun masih perlu ditingkatkan. Keadaan prasarana dan sarana transportasi memadai mulai dari pusat-pusat produksi sampai ke Ibukota kabupaten Banggai. Kondisi jalan di Kabupaten Banggai disajikan pada Tabel 7.

### **Keunggulan Komparatif dan Kompetitif**

Rata-rata produktivitas padi di Batui dan Toili adalah 4,34 ton/ha, sehingga memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan komoditas lainnya. Komoditas padi dikatakan memiliki keunggulan komparatif terhadap komoditas jagung jika minimal dapat menghasilkan

Tabel 8. Produksi Minimal Komoditas Padi agar Mampu Bersaing (Memiliki Keunggulan Komparatif) Terhadap Komoditas Palawija di Kabupaten Banggai, 2000

Komoditas	Produksi (t/ha)	Harga (Rp/t)	Nilai produk (Rp/ha)	Biaya produk (Rp/ha)	Keuntungan (Rp/ha)
Jagung	2,01	600.000	1.206.000	1.090.000	116.000
Ubikayu	10,00	100.000	1.000.000	615.000	385.000
Kedelai	1,10	2.480.962	2.729.058	1.006.453	1.722.605
Kc. tanah	0,87	2.643.678	2.300.000	1.243.500	1.056.500
Kc. hijau	0,85	1.500.000	1.275.000	939.000	336.000
Padi	-	1.115.994	-	2.569.615	-
Terhadap Jagung	2,41		2.689.546		119.000
Terhadap Ubikayu	2,65		2.957.384		387.769
Terhadap Kedelai	3,85		4.296.577		1.726.962
Terhadap Kc.Tanah	3,25		3.626.980		1.057.365
Terhadap Kc.Hijau	2,60		2.901.584		331.969

Tabel 9. Harga Minimal Komoditas Padi agar Mampu Bersaing (Memiliki Keunggulan Kompetitif) Terhadap Komoditas Palawija di Kabupaten Banggai, 2000

Komoditas	Produksi (t/ha)	Harga (Rp/t)	Nilai produk (Rp/ha)	Biaya produk (Rp/ha)	Keuntungan (Rp/ha)
Jagung	2,01	600.000	1.206.000	1.090.000	116.000
Ubikayu	10,00	100.000	1.000.000	615.000	385.000
Kedelai	1,10	2.480.962	2.729.058	1.006.453	1.722.605
Kc. tanah	0,87	2.643.678	2.300.000	1.243.500	1.056.500
Kc. hijau	0,85	1.500.000	1.275.000	939.000	336.000
Padi	4,34	-	-	2.569.615	-
Terhadap Jagung		618.805	2.685.614		115.999
Terhadap ubikayu		680.787	2.954.616		385.001
Terhadap kedelai		988.991	4.292.221		1.722.606
Terhadap Kc.tanah		835.510	3.626.113		1.056.498
Terhadap Kc.hijau		669.497	2.905.617		336.002

2,41 ton/ha, terhadap ubikayu 2,65 ton/ha, terhadap kedelai 3,85 ton/ha, terhadap kacang tanah 3,25 ton/ha, dan kacang hijau 2,60 ton/ha (Tabel 8).

Persaingan antarkomoditas di lahan sawah memberi peluang yang besar bagi komoditas padi untuk memberikan pendapatan terbesar bagi petani. Di samping keunggulan komparatif yang diperhitungkan dari aspek jumlah produksi, diperlukan juga perhitungan dari aspek harga yang

akan menentukan keunggulan kompetitif suatu komoditas yang diandalkan. Agar komoditas padi memiliki keunggulan kompetitif, maka minimal produksinya memiliki harga yang sama dengan Rp 619/kg, Rp 681/kg, Rp 989/kg, Rp 836/kg, Rp 669/kg berturut-turut terhadap harga komoditas jagung, ubikayu, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau (Tabel 9). Komoditas padi merupakan andalan di lahan sawah irigasi, maka komoditas ini harus mampu bersaing dengan komoditas kedelai yang dalam perhitungannya memiliki

harga tertinggi diantara seluruh komoditas palawija yang diusahakan petani, yaitu minimal dengan harga Rp 989/kg. Data yang diperoleh di lapangan bahwa harga gabah kering panen (GKP) rata-rata adalah Rp 1.116/kg (lebih tinggi dari harga komoditas lainnya). Ini berarti komoditas padi mampu bersaing dengan komoditas lainnya, dan merupakan komoditas strategis yang diandalkan di Sulawesi Tengah.

### Analisis Integrasi Pasar

Analisis integrasi pasar digunakan untuk melihat keterpaduan harga antara harga beras di tingkat petani (Pf) dan harga beras di tingkat pengecer atau konsumen (Pr). Melalui analisis integrasi pasar dapat diketahui struktur pasar yang terjadi baik pasar di tingkat petani maupun di tingkat pengecer atau konsumen. Metode analisis ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator efisiensi pemasaran dan dapat menjelaskan posisi tawar (*bargaining position*) antara petani dengan lembaga pemasaran di tingkat pengecer. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara harga di tingkat petani (Pf) dengan harga di tingkat pengecer atau konsumen (Pr) sebesar 0,71 yang memberi arti bahwa kenaikan harga satu unit di tingkat pengecer/konsumen akan diikuti dengan kenaikan harga lebih kecil dari satu unit (0,71) di tingkat petani produsen. Walaupun pemasaran beras belum efisien, namun nilai koefisien korelasi 0,71 menunjukkan bahwa korelasi harga di tingkat petani (Pf) dengan harga di tingkat pengecer/konsumen (Pr) cukup kuat. Oleh karena itu, integrasi pasarnya mendekati sempurna atau *bargaining position* petani terhadap lembaga pemasaran cukup kuat. Pendapat ini didukung oleh Sugiarto (1992) bahwa koefisien korelasi antara 0,0-0,5 diartikan *bargaining position* petani terhadap lembaga pemasaran adalah lemah (integrasi pasarnya tidak sempurna), sedangkan koefisien korelasi 0,5-1,0 adalah cukup kuat sampai kuat yang berarti *bargaining position* petani terhadap lembaga pemasaran cukup kuat sampai kuat dengan integrasi pasarnya mendekati sempurna sampai sempurna.

### Masalah/Kendala Usahatani Padi dan Peluang Pemecahannya

Masalah/kendala yang sering terjadi di sentra produksi padi di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai adalah masalah penyiapan alsintan, modal, sampai dengan kegiatan-kegiatan panen dan pengolahan. Meskipun demikian, masih terdapat peluang pemecahannya seperti yang disajikan pada Tabel 10.

### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Potensi sumberdaya pertanian di kawasan Batui-Toili (Kapet Batui) Kabupaten Banggai sangat sesuai dikembangkan untuk komoditas padi karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang lebih besar dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya. Komoditas padi dapat menjadi komoditas andalan karena mulai dari subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai dengan subsistem pemasarannya cukup terjamin.
2. Kebijakan pemerintah cukup efektif dalam pengembangan usahatani padi dilihat dari korelasi harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pengecer/konsumen dan posisi tawar petani yang cukup kuat.
3. Dalam mengusahakan komoditas andalan ini, terdapat beberapa masalah dan kendala yang harus diminimalkan pengaruhnya terhadap proses produksi komoditas tersebut. Masalah dan kendala yang akan dihadapi petani dalam usahatani padi berbasis agribisnis adalah kurangnya modal petani untuk mengembangkan usahatannya sesuai dengan anjuran, di samping fasilitas alat dan mesin pertanian untuk mempercepat kerja dan efisiensi tenaga kerja.
4. Saran atau implikasi kebijakan untuk mendukung usahatani padi berbasis agribisnis di Batui-Toili adalah menambah jumlah peralatan/mesin pertanian untuk usahatani padi berupa traktor, *thresher*, dan

Tabel 10. Masalah/Kendala dan Peluang Pemecahan Usahatani Padi di Kapet Batui, 2001

Lokasi	Masalah/kendala	Peluang pemecahan
Kelurahan Balantang, Sisipan, Sukamaju, Kecamatan Batui	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah traktor terbatas, terlambat tanam sampai dengan satu bulan.</li> <li>Jumlah bibit/rumpun terlalu banyak (10 bibit/rumpun), umur bibit tua karena menunggu selesainya pengolahan tanah</li> <li>Pupuk sering tersedia tidak tepat waktu sehingga petani tidak menggunakannya yang mengakibatkan rendahnya produktivitas.</li> <li>Jumlah tenaga kerja panen terbatas terutama jika waktu panen bersamaan dengan Kecamatan Toili.</li> <li>Perontokan gabah menggunakan <i>thresher pedal</i> sehingga memerlukan waktu yang lama, banyak malai yang telah disabit menumpuk di lapangan sampai beberapa hari bahkan ada yang sudah berkecambah.</li> <li>Tempat penjemuran masih sangat terbatas sehingga akan mempengaruhi kualitas beras (kuning), harganya murah.</li> <li>Kehilangan hasil masih tinggi sekitar 10%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu penambahan jumlah traktor untuk menanggulangi keterlambatan pengolahan tanah, yang mengakibatkan keterlambatan tanam. Jumlah bibit seharusnya 3 bibit / rumpun. Takaran benih seharusnya 25 kg/ha, umur bibit seharusnya 20 – 25 hari.</li> <li>Tidak serempaknya waktu tanam menyebabkan umur tanaman bervariasi sehingga waktu pemupukan tidak serempak. Ini mempersulit penyaluran/ distribusi pupuk. Oleh karena itu perlu penanaman serempak yang dapat ditanggulangi dengan penambahan jumlah traktor.</li> <li>Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja terutama saat panen, diperlukan mesin perontok gabah yang memiliki kapasitas lebih besar dibanding <i>thresher pedal</i> yang dimiliki petani. Mesin perontok ini dapat mengurangi kehilangan hasil dan kualitas beras menjadi lebih baik karena cepatnya perontokan dan tidak sampai tersimpan lama di lapangan.</li> <li>Perlu disiapkan tempat penjemuran gabah melalui kerjasama antar kelompok tani dengan cara menyewa.</li> </ul>
Desa Tolisu, Kecamatan Batui	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tikus merupakan hama utama di daerah ini. Petani menggunakan benih sangat banyak untuk mengantisipasi serangan tikus. Penggunaan benih 40 – 80 kg/ha.</li> <li>Tempat penjemuran gabah terbatas. Penjemuran dilakukan di halaman rumah sehingga memerlukan waktu lama (1 bulan).Warna beras kuning dan harganya murah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekitar petakan sawah/pematang yang menjadi sarang tikus harus selalu dibersihkan. Rumput tidak boleh sampai menjadi tinggi/semak-semak. Pengendalian secara gropyokan atau gotong royong perlu dilakukan petani. Pembersihan pematang secara sendiri-sendiri tidak akan efektif. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antar kelompok tani.</li> <li>Perlu penambahan tempat penjemuran gabah di kelompok tani dan disewakan.</li> </ul>

penggilingan gabah/*rice milling unit* (RMU) double atau multi phase. Dengan meningkatkan jumlah peralatan/mesin ini akan meningkatkan efisiensi usahatani padi, sehingga dapat meningkatkan mutu gabah sekaligus dapat meningkatkan harga dan pendapatan usahatani padi. Peralatan/mesin ini dapat dikelola swasta yang sudah berpengalaman

dalam usaha sejenis dan mendapat bantuan modal berupa kredit lunak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O. dan K. Kariyasa. 1995. Model keuntungan kompetitif sebagai alat analisis dalam memilih komoditas pertanian unggulan. In-

- formatika Pertanian 5(2). Pusat Penyiapan Program Penelitian, Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Adjid, D.A. 1995. Strategi pengembangan agribisnis di Indonesia. Makalah Disajikan pada Kongres III Perhimpin dan Simposium Meteorologi Pertanian IV. Yogyakarta, 26-28 Januari 1995.
- Akum, S. 1999. Potensi dan peluang investasi agribisnis di Kabupaten Dati II Banggai. Makalah Bupati Kepala Daerah Tk. II Banggai pada Apresiasi Promosi Produk Unggulan Agribisnis Sulawesi Tengah. Kanwil Dep. Pertanian Palu, 3-4 Desember 1999.
- Anasiru, R.H., L. Hutahaean, A. Prabowo, dan IGP. Sarasutha. 2001. Analisis dan Pemecahan Masalah-Masalah Pembangunan Pertanian Wilayah Sulawesi Tengah. Laporan Kegiatan Tahun 2000, BPTP Sulawesi Tengah (Belum Dipublikasikan).
- Beebe, J. 1987. Rapid Rural Appraisal: Evolution of the Concept and Definition of Issues. In: Chamber, R. and J. Beebe (Eds). Proceeding of the 1985 International Conference on Rapid Rural Appraisal. Rural Systems Research Project and Farming Systems Research Project. Khon Kaen University, Thailand.
- Budianto, J. 2003. Kebijakan penelitian dan pengembangan teknologi peningkatan produktivitas padi terpadu (P3T) di Indonesia. Pros. Lokakarya Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T) Tahun 2002. Puslitbangtan, Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Chambers, R. 1981. Rapid Rural Appraisal: Rationale and Repertoire. Public Administration and Development. 1: 95-106.
- Chambers, R. 1991. Partisipatory shortcut methods of gathering social information for project. In Putting People First. Sociological Variables in Developing Project. Ed. M. Cernea, New York: Oxford Univ. Press.
- Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan. 1999. Penyusunan Rencana Tindak dan Program Investasi Kapet Batui Sulawesi Tengah. Laporan Akhir Dep. PU. Jakarta.
- Fagi, A.M., I. Las, dan M. Syam. 2002. Penelitian Padi: Menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. Prosiding Balitpa, Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Gani, A., Triny, A., Jatiharti, I.P. Wardana, and I. Las. 2002. The system of rice intensification in Indonesia. In: Assessment of the System of Rice Intensification. Proceed. Of an International Conference in Sanya, China. April 1-4, 2002.
- Grandstaff, T.B., and S.W. Grandstaff. 1987. A Conceptual basis for methodological development in Rapid Rural Appraisal. In: Chamber, R. and J. Beebe (Eds). Proceeding of the 1985 International Conference of Rapid Rural Appraisal. Rural Systems Research Project and Farming Systems Research Project. Khon Kaen Univ, Thailand.
- Gudjarati, D. 1993. Basic Econometrics. McGraw-Hill, Inc. New York.
- Hutahaean, L., R.H. Anasiru, M. Slamet, S. Bahri, Hartono, C. Manoppo, dan IGP. Sarasutha. 2002. Analisis dan Pemecahan Masalah-Masalah Pembangunan Pertanian Wilayah Sulawesi Tengah: Pengembangan Jasa Alsintan Dalam Usahatani Padi Berbasis Agribisnis. Laporan Kegiatan Tahun 2001, BPTP Sulawesi Tengah (Belum Diterbitkan).
- Kasryno, F., P. Simatupang, dan V.T. Manurung. 1993. Penelitian Pertanian dengan Pendekatan Agribisnis. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian (JPPP). XII (4). Jakarta.
- Manwan, I., Sumarno, A.S. Karama, dan A.M. Fagi. 1990. Teknologi Peningkatan Produksi Kedelai di Indonesia. Publikasi Khusus Pus/02/89, diterbitkan oleh Puslitbangtan, Bogor.
- P.T. Pusri Palu. 1999. Realisasi Penyaluran/Penjualan Pupuk di Kabupaten Banggai. Luwuk.
- Ponulele, J. 1999. Informasi dan Pengenalan KAPET Batui. Badan Pengelola KAPET Batui. Luwuk.
- Prabowo, A., Handaka, Harjono, Harsono, dan U. Budiarti. 2002. Rekayasa alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi dan daya saing sistem usaha pertanian padi. Dalam: B. Suprihatno, J. Soejitno, M. Syam, A.K. Makarim, Suwandi, I.N. Widiarta,

- Hermanto. Kebijakan Perberasan dan Inovasi Teknologi Padi. Puslitbangtan, Bogor. P 159-170.
- Sarasutha, IGP., B. Prastowo, Zubachtirodin, M. S. Lalu, L. Hutahaeen. 2000. Analisis Potensi Pengembangan Agribisnis Kawasan Batuitoili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan Kegiatan Tahun 1999/2000, BPTP Sulawesi Tengah (Belum Diterbitkan).
- Sarasutha, IGP., L. Hutahaeen, R.H. Anasiru, S. Bakhri, C. Manoppo, dan D. Kemur. 2003. Analisis dan Pemecahan Masalah Kebijakan Pada Usahatani Padi di Sulawesi Tengah. Laporan Kegiatan Tahun 2002, BPTP Sulawesi Tengah (Belum Diterbitkan).
- Sek. Pel. Bimas Kab. Banggai. 1999. Data Luas Tanam dan Penggunaan Pupuk di Kabupaten Banggai. Luwuk.
- Setyono, A. dan S. Nugraha. 2001. Peranan Penanganan Pasca Panen dalam Peningkatan Produksi Padi. Dalam: I. Las, Suparyono, A.A. Daradjat, H. Pane, U.S. Nugraha, H.M. Toha, A. Tyasdjaja, O.S. Lesmana (Eds). Lokakarya Padi, Implementasi Kebijakan Strategis untuk Peningkatan Produksi Padi Berwawasan Agribisnis dan Lingkungan. Puslitbangtan, Bogor. P 200-210.
- Sigit. 1979. Analisis Break Even Point. Penerbit FE-UGM. Yogyakarta.
- Smith, M.B. 1993. Innovations Toward Rapid and Participatory Rural Appraisal. *In: Var Braun J. and Detlev Puets (ed). Data Needs for Food Policy in Developing Countries. New Directions for Household Surveys. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Washington, D.C.*
- Soekartawi, A. Soeharjo, J.L. Dillon, J.B. Hardaker. 1984. Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. UI-Press. Jakarta.
- Swastika, DKS., Jakaria, Hamsudin, R.R. Retno, N. Neomi, dan U. Suparman. 2002. Analisis kebijakan pengadaan kredit traktor di Kalimantan Timur. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (JPPTP)*, 5(2). PPPSEP, Bogor. p 54-65.
- Syafuruddin, T. Rumajar, J.G. Kindangen, R.T.P. Hutapea, A. Negara, D. Bulu, J. Limbongan. 1999. Pemilihan Komoditas Unggulan Berdasarkan Kontribusi ZAE Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. BPTP Biromaru, Palu.
- Zaini, Z., I. Las, Suwarno, B. Haryanto, Suntoro, E.E. Ananto. 2003. Pedum Kegiatan Percontohan Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu. Deptan. Jakarta.